

Kebijakan Mobil Nasional (MOBNAS) dan implikasinya dalam kerangka organisasi Perdagangan Dunia (WTO)

Albert Abdi, author

Deskripsi Lengkap: <https://lib.ui.ac.id/detail?id=90675&lokasi=lokal>

Abstrak

Penulisan tesis ini dilatarbelakangi oleh lahirnya kebijakan mobil nasional yang ternyata memiliki implikasi internasional, yakni munculnya gugatan tiga negara utama penghasil mobil dunia (Jepang, Uni Eropa dan Amerika Serikat) di Forum WTO. Permasalahan yang berkaitan dengan sengketa mobil nasional dalam forum WTO, berangkat dari adanya perbedaan pandangan diantara pihak yang bersengketa dalam menilai kebijakan mobil nasional menurut ketentuan WTO, dimana pada satu menganggap kebijakan mobil nasional bertentangan dengan ketentuan WTO, sementara pada sisi lainnya menganggap kebijakan mobil nasional dibenarkan oleh ketentuan WTO.

Tujuan dari penelitian tesis ini adalah ingin mengetahui pandangan pihak-pihak yang bersengketa dalam menilai kebijakan mobil nasional menurut ketentuan WTO dan menganalisis proses penyelesaian sengketa yang terjadi di forum WTO. Untuk menjawab permasalahan yang ada, kerangka pemikiran yang digunakan dalam penelitian ini mengacu kepada pendekatan teori ekonomi politik internasional, khususnya teori tentang pengambilan keputusan dan rezim internasional. Penulisan tesis ini menggunakan analisis deskriptif dengan melihat pengaruh masing-masing independent variable terhadap dependent variable. Adapun data yang digunakan dalam studi ini sendiri diperoleh melalui studi kepustakaan.

Hasil penelitian yang penulis peroleh memperlihatkan bahwa adanya perbedaan pandangan diantara negara penggugat dan negara tergugat dalam melihat kebijakan mobil nasional menurut ketentuan WTO, sesuai dengan "kepentingan nasional" masing-masing, telah menimbulkan sengketa dagang di forum WTO. Oleh karenanya dalam menerapkan suatu kebijakan, pemerintah hendaknya berlaku adil (tidak diskriminatif) dan bersikap transparan. Disamping itu kuatnya keterkaitan / ketergantungan antar negara-negara di dunia (globalisasi), kebijakan domestik yang diambil suatu negara harus mengacu kepada ketentuan yang berlaku di tingkat internasional.